

BAB I

PENDAULUHAN

1.1 Latar belakang

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi untuk menciptakan dalam sebuah sistem yang power share pada tiap level pemerintahan, serta menuntut kemandirian sistem manajemen didaerah pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah sejarah dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepala masyarakat yang luas sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah diatur dengan peraturan menteri keuangan yaitu PMK No. 59/PMK 06/2015, tentang system akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan pembedagri No. 59 tahun 2007 tentang pendoman pengelolaan keuangan daerah perubahan atas pembedagri No. 13 tahun 2013 yaitu pada pasal 23 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pendoman bagi pemrintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlu kan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dapat dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal,. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi oleh karena itu diperlukan

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah yaitu Manual Adminitrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981 sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini. (Sri Dewi Wayundaru,2001)

Imformasi yang kredibel adalah imformasi yang handal dapat dipercaya (reliable information) yang sangat diperlukan untuk melakuklan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi resiko reliabilitas imformasi akan tumbuh dengan minimalnya ditingkat kesalahan yang menyajikan data ,tingginya ketaatan dalam terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam pengungkapan. (Mohammad, 2004)

Organisasi pada pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku intitas akuntansi akan melaksanakan sistem pemerintah daerah sekurang-sekurangnya meliputi prosedur akuntansi kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset tetap, barang milik daerah dan prosdur akuntansi selain kas, system akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang digunakan sekarang ini adalah sistem akuntansi mengacau pada kebijakan perundang yaitu pemendagri No. 59/2007 dan direvisi kembali pada pemendagri No, 21 /2011 tentang pendoman pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Tampubolon (2004) perilaku keorganisasian adalah studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi yang mana dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi .perilaku organisasi ini mendasarkan pada analisis terhadap manusia bertindak dalam organisasi.

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggung jawaban dan menyelenggarakan pemerintah. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu akurat dan dapat di pertanggungjawab kan, Sebaliknya sistem informasi akuntansi yang usang dan tidak akurat akan mengancam sendi-sendi partisipasi masyarakat , transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian Tjhai fun Jin (2003) dalam Dewi 2011 diperoleh hasil bahwa pada perusahaan yang memiliki program pelatihan dan pendidikan pengguna terdapat perbedaan yang signifikan dengan keputusan pengguna tetapi tidak terbukti adanya perbedaan pengguna sistem.

Penelitian Rereplikasi dari penelitian (Kayati : 2016) dengan judul pengaruh Faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Perbedaannya faktor organisasi seperti pelatihan dan dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi keuangan daerah, sedangkan faktor kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi keuangan daerah, di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini replikasi dari (Kayati 2016) peneliti ini dilakukan Provinsi Jawa Tengah Judul Pengaruh Faktor Keperilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .Perbedaannya faktor organisasi seperti pelatihan dan dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi keuangan daerah, sedangkan faktor kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi keuangan daerah, Sedangkan peneliti sekarang

tahun 2020 hanya pada pegawai kantor DPR Provinsi Papua. Judul Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti diatas tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul. "PENGARUH KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH "(suatu studi Kasus pada Badan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua). Tujuan penelitian 2020 perbedaannya melihat pengaruh langsung antara variabel independen dengan variabel dependen Terhadap kegunaan system akuntansi terhadap keuangan daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di rumuskan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan tujuan terhadap peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah dukungan atasan terhadap peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah pelatihan dan sistem akuntansi keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka peneliti menarik tujuan meneliti adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

2. Untuk mengetahui pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari peneliti ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi praktisi Sebagian bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam Implementasikan sistem akuntansi keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas
2. Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menjadi dasar pemikiran, dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama yaitu mengenai.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BABII : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi,: Faktor perilaku akuntansi, pengertian system akuntansi keuangan daerah, kebijakan akuntansi, akuntabilitas dan transparansi, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari pada penelitian yang diambil dari respodent di kantor dewan perwakilan rakyat papua (DPRP PAPUA)

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian yang di dapat dan sarang peneliti.